

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang akan mendasari penelitian ini. Pada pembahasan ini akan menjadi panduan dalam memahami secara mendalam untuk memecahkan permasalahan yang ada serta akan dibahas mengenai studi terkait dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Dalam rangka pembangunan bangsa dibutuhkan modal manusia yang memenuhi kualifikasi keterampilan, pengetahuan dan kompetensi pada berbagai bidang keahlian. Maka diperlukan tolak ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan Manusia, hal ini mendasari adanya ukuran yang ditetapkan oleh *United Nation Development Programme* (1990) yaitu Indeks Pembangunan Manusia, suatu pendekatan yang digunakan sebagai tolak ukur tinggi rendahnya pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar manusia. Pembangunan Manusia merupakan komponen pembangunan melalui pemberdayaan penduduk yang menitikberatkan pada peningkatan dasar manusia. Pembangunan yang dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan dan daya beli. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tercapai tujuan dari pembangunan. Pembangunan merupakan sebuah proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari seberapa besar permasalahan yang dapat diatasi terlebih lagi permasalahan yang paling mendasar. Permasalahan yang ada di antaranya berupa masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan yang tidak menyeluruh dan masalah keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi lainnya. Tercapainya tujuan pembangunan yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia sangat tergantung pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang. Dalam proses mencapai tujuan pembangunan, ada empat komponen yang harus diperhatikan dalam pembangunan manusia (UNDP, 1995). Empat komponen tersebut dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Produktivitas

Manusia harus berupaya meningkatkan produktivitas serta berpartisipasi secara penuh dalam menghasilkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai bagian dari pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya ekonomi dan sosial politik. Segala hambatan yang dapat mencegah untuk memperoleh akses tersebut harus dihilangkan, karena semua orang harus dapat peluang berpartisipasi dalam mengambil manfaat yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

3. Kestinambungan

Akses terhadap kesempatan atau peluang yang tersedia harus dipastikan tidak hanya dinikmati

i oleh generasi sekarang tetapi juga disiapkan untuk generasi mendatang. Segala sumber daya harus senantiasa dapat diperbarui.

4. Pemberdayaan

Semua orang diharapkan dapat berpartisipasi secara penuh dalam menentukan arah kehidupan mereka. Sama halnya dalam memanfaatkan proses pembangunan maka harus berpartisipasi dalam mengambil keputusan.

Pertumbuhan dan pembangunan sumber daya manusia harus selalu diupayakan oleh pemerintah guna mempersiapkan generasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana permasalahan yang paling mendasar dalam pembangunan ini berada dalam peningkatan kemampuan dasar masyarakat baik secara fisik maupun non fisik (mental dan spiritual). Dalam hal ini pembangunan manusia menitikberatkan peningkatan kualitas hidup yang dilihat dari tiga aspek, yaitu: aspek kesehatan, yang diukur berdasarkan besar-kecilnya angka harapan hidup saat lahir, aspek pendidikan yang diukur berdasarkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan aspek daya beli yang diukur berdasarkan nilai pengeluaran per kapita.

Berdasarkan kecenderungan yang lebih besar terhadap kebutuhan dasar dari konsep pembangunan sumber daya manusia, maka perlu penanganan yang intensif oleh pemerintah dalam pengelolaanya. Dilihat dari keterkaitan ketiga aspek tersebut terhadap aspek lainnya, menunjukkan bahwa taraf baik dalam penanganan ketiga aspek tersebut, secara signifikan memberikan taraf baik terhadap pembangunan ekonomi maupun sosial politik. Artinya, dengan menfokuskan pembangunan

sumber daya manusia dalam aspek kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat, mampu memberikan dampak positif terhadap aspek lainya.

Peranan pembentukan modal manusia sering dikaitkan dengan investasi membangun bangsa. Proses menyiapkan sumber daya yang berkualitas, mempunyai keahlian, produktif dan inovatif sangat penting bagi suatu negara dalam meningkatkan ketahanan nasional. Ketahanan tersebut dilihat dari seberapa besar keberhasilan pembangunan dalam pemerintahan, perekonomian hingga ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.2 Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Menurut Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Fator utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut akan diperoleh apabila pengusaha tersebut dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksi. Semakin besar permintaan,

semakin besar pula barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja.

Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan. Jadi tidak mengejutkan apabila pengangguran menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam perdebatan politik oleh para politisi yang seringkali mengkaji bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan (Mankiw, 2000).

Untuk mengukur tingkat pengangguran suatu wilayah bisa diperoleh melalui dua pendekatan :

1. Pendekatan Angkatan Kerja (*Labour force approach*) Besar kecilnya tingkat pengangguran dapat dihitung berdasarkan presentase dan perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja. $\text{Pengangguran} = \frac{\text{jumlah yang menganggur}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$
2. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labour utilization approach*)
 - 1) Bekerja penuh (*employed*) adalah orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.
 - 2) Setengah menganggur (*underemployed*) adalah mereka yang bekerja namun belum dimanfaatkan penuh atau jam kerjanya dalam seminggu kurang dari 35 jam.

Pengangguran Berdasarkan Cirinya

Berdasarkan cirinya, Pengangguran dibagi menjadi empat kelompok (Sukirno, 1994):

1. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

2. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai. Pada negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat

menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

3. Pengangguran Musiman

Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Disamping itu pada umumnya para petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim.

4. Setengah Menganggur

Pada negara-negara berkembang migrasi dari desa ke kota sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagian terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Disamping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan

sebagai setengah menganggur (*underemployed*). Dan jenis penganggurannya dinamakan *underemployment*. (Muslim, 2014)

2.3 Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup.

Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya menyebabkan menjadi miskin. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan dunia ketiga. Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari Chambers menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi, yaitu:

1. Kemiskinan (*Proper*)

Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada

kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.

2. Ketidakberdayaan (*Powerless*)

Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*Social Power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of Emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.

4. Ketergantungan (*Dependency*)

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi

persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

5. Keterasingan (Isolation)

Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

2.4. Studi Terkait

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Woyanti (2021) meneliti tentang pengaruh PDRB, Kemiskinan, Pengangguran dan Belanja Modal terhadap IPM di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2011-2019. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi panel data dengan metode Fixed Effect Model (FEM) dengan waktu penelitian 2011-2019. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM, Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan pengangguran dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Penelitian yang dilakukan oleh Kiha, Seran, dan Lau (2021) meneliti tentang pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari kantor Badan Pusat statistik Kabupaten Belu. Teknik analisis data yang digunakan adalah Path Analysis. Hasil menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk (X1) terhadap variabel Pengangguran (X2) sebesar -0,150 yang artinya bahwa antara variabel jumlah penduduk dan variabel pengangguran mempunyai hubungan yang sangat lemah maka hubungan tersebut tidak signifikan. Hasil dari analisis variabel jumlah penduduk (X1) dan pengangguran (X2) terhadap kemiskinan (X3) sebesar 0,790 yang artinya bahwa antara variabel jumlah penduduk, pengangguran dan kemiskinan mempunyai hubungan yang kuat. Hasil dari analisis variabel jumlah penduduk (X1), pengangguran (X2) dan kemiskinan (X3) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) sebesar 0,766 yang artinya bahwa antara variabel jumlah penduduk, pengangguran, kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia mempunyai hubungan yang kuat. Dari hasil analisis koefisien determinan R² di peroleh nilai sebesar 0,559 hal ini artinya besarnya variabel Indeks Pembangunan manusia (Y) di pengaruhi oleh variabel jumlah penduduk (X1), pengangguran (X2) dan kemiskinan (X3) sebesar 55,9% dan sisanya sebesar 44,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasuki dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Widyaningrum, Khairunnisa, dan Huda (2020) tentang pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi data panel

dengan pendekatan *pool model* menggunakan software *Eviews 9* dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data yang telah dipublikasikan di beberapa sumber yaitu Badan Pusat Statistika dan website Kementerian Keuangan periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap IPM yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas lebih kecil dari *alpha* (0,05), sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas lebih besar dari nilai *alpha* (0,05). Secara simultan semua variabel independent dalam penelitian berpengaruh secara signifikan terhadap IPM yang ditunjukkan melalui R^2 sebesar 80,78% yang menunjukkan bahwa variabel kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dapat menjelaskan variabel Y, sisanya sebesar 19,22% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Chalid dan Yusuf (2014) tentang pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia, Badan Pusat Statistik Provinsi Riau dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau. Data sekunder yang digunakan adalah data Panel tahun 2006-2011 menurut daerah tingkat II Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Dari hasil analisis diketahui tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum

kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap IPM. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negative terhadap IPM, masing-masing dengan koefisien regresi sebesar -0,163 dan - 0,084. Upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM, dengan koefisien regresi masing-masing 0,005 dan 0,953. Variable yang sangat besar pengaruhnya terhadap IPM adalah laju pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulana, Pitoyo, dan Alfana (2022) tentang pengaruh Kemiskinan dan Kondisi Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data dasar dari data terbitan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Pengukuran pengaruh kemiskinan dan kondisi ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia digunakan analisis regresi linear berganda dengan Uji t dan Uji F. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017. Variabel kemiskinan mempunyai koefisien 0,34 artinya jika terjadi kenaikan kemiskinan sebesar 1 persen maka akan menurunkan IPM sebesar 0,34 di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan hasil lain menunjukkan bahwa kondisi ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017.